

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK DI NEGARA SUDAN

A. Profil umum negara Sudan

Sudan adalah salah satu negara di Afrika yang memiliki daratan terluas yakni sekitar 2.505.813 km² yang berbatasan langsung dengan negara seperti Mesir disebelah Utara; Libya, Afrika Tengah dan Chad disebelah Barat; di selatan berbatasan dengan Zaire, Uganda, dan Kenya; Sedangkan disebelah Timur berbatasan dengan Ethiopia, Eritrea, dan Laut Merah. Wilayah Sudan sendiri beriklim tropis dibagian selatan dan beriklim gurun di bagian Utara.¹

Afrika dari dahulu terkenal dengan keragaman suku dan etniknya di Sudan saja terdapat ratusan etnik yang termasuk komunitas Arab Afrika maupun Afrika hitam dan suku-suku lainnya seperti Beja maupun Nubia. Dikarenakan latar belakang historis Sudan yang menjadi bagian dari kerajaan Islam maka hampir seluruh penduduk di Sudan beragama Islam dan hanya sekitar 5% yang beragama Kristen yang kebanyakan berada di wilayah Sudan Selatan dan sekitar 20% yang menganut kepercayaan animisme. Negara Sudan dipimpin oleh seorang Presiden dan memiliki dua orang wakil presiden yang bertugas membantu Presiden sama halnya dengan sistem presidensial. Pusat pemerintahan ditempatkan di Khartoum dengan meliputi 26 negara bagian. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat di tabel 3.

¹ www.wikipedia.com. "Sudan", diakses 20 Mei 2008.

Tabel 3, Profil Negara Republik Sudan (*The Republic of the Sudan*) 2007

1.	Nama resmi	<i>The Republic of the Sudan</i>
2.	Kepala Negara/Kepala Pemerintahan	Presiden Omer Hassan Ahmed El-Bashir
	Wapres/Kepala pemerintahan Sudan selatan	Salva Kiir Mayardit
3.	Menteri Luar Negeri	DR. Lam Akol Agawen
4.	Ibu kota	Khartoum
5.	Luas wilayah	2.505.813 km ²
6.	Batas wilayah	Utara : Mesir (1.273 km) Barat : Libya (138 km) Afrika Tengah (1.165 km) Chad (1.360 km) Selatan : Zaire (628 km) Uganda (435 km) Kenya (232 km) Timur : Ethiopia (1.160 km) Eritrea (605 km) Laut Merah (853 km)
7.	Iklim	Gurun di Utara dan tropis di Selatan, dengan curah hujan 100 mm di Sudan Utara dan 100 mm di Sudan Selatan. Suhu udara bulan April – Oktober 37o C-47o C Nopember – Maret 26oC – 37o C.
8.	Pembagian wilayah	26 negara bagian
9.	Penduduk	39,379,358 jiwa (Juli 2007) Multi etnik :
		Afrika Hitam 52%;
		Arab 39 %
		Beja dan Nubian masing-masing 6%
		Pertumbuhan penduduk 1,6%
10.	Bahasa	- Arab (bahasa resmi) - Nubian - Inggris
11.	Agama	Islam (Sunni) 75% Animis 20%, Kristen 5%
12.	Ekonomi	Mata uang : Sudanese Dinar (sedang dalam proses penggantian mata uang menjadi POUND) SD.217,2 = US \$ 1.00 (2006)
15.	Angkatan bersenjata	200.500 personil : AD = 100.000;AL=2500 AU = 2000, Hansip 15 000 dan milisia sekitar 81.000 personil.
16.	Lagu Kebangsaan	<i>El Salam Al Wathoni</i>
17.	Hari Nasional	1 Januari (Hari Kemerdekaan) 30 Juni (Revolusi Keselamatan Nasional/ <i>Al Inqaz Al Wathani</i>)

Sumber: dokumen Deplu, Direktorat Jendral Asia Pasifik dan Timur Tengah, CP Sudan 2008

1. Sejarah Singkat Sudan

Nama “Sudan” berasal dari bahasa Arab “*Bilad as Sudan*” yang berarti “*Land of Black*”. Sejarah panjang Sudan terjadi akibat kontak pertama antara penduduk di Utara Afrika/ Mesir dengan penduduk kulit hitam terjadi di sepanjang sungai Nil pada abad ke-3 SM yang kemudian dikenal dengan nama Nubia. Pada abad ke-6 misionaris Kristen memasuki Sudan dari Mesir, namun penyebaran agama ini terdesak oleh Nubia-Arab yang muslim. Agama Kristen tumbuh dan berkembang pada abad ke-18 sampai abad 19 dan dapat bertahan diwilayah Sudan Selatan hingga sekarang. Pada abad ke-18 Mesir merupakan wilayah kemaharajaan Turki *Othman Empire* dan Sudan termasuk didalamnya. Setelah kekuasaan Turki surut muncul Inggris sebagai penguasa baru di Mesir dan Sudan.²

Keinginan untuk memerdekakan diri yang kuat, mendorong pejuang-pejuang Sudan pimpinan **Ahmed Al Mahdi** mengadakan perlawanan dan berhasil mengusir Mesir pada tahun 1885. Namun pada tahun 1899 Sudan direbut kembali oleh Inggris dan Mesir. Perjuangan rakyat Sudan untuk mengusir penjajah yang semakin meningkat mendorong Inggris dan Mesir membuat perjanjian tentang kemerdekaan Sudan dan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih partai politik sebagai embrio negara Sudan. Januari 1954 dilaksanakan Pemilu dan dimenangkan oleh *National Unionist Party* (NUP) pimpinan **Ismail Al Azhari** yang selanjutnya menjadi Presiden Pertama Sudan 1 Januari 1956.³

²*Ibid*

³ Dokumen Deplu, Direktorat Timur Tengah. CP Sudan 2008

Pertentangan antar kelompok mendorong Jenderal **Ibrahim Abboud** melakukan kudeta dan menjadi presiden kedua hingga menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah transisi di bawah **Al Khatim Al Khalifa** pada tahun 1964. Selanjutnya Khalifa menyerahkan kekuasaan kepada pemenang Pemilu yaitu *Umma Party (UP)* dan *National Unionist Party (NUP)* yang masing-masing dipimpin oleh **Sadiq Al Mahdi** sebagai Perdana Menteri dan **Ahmed Mifghani** sebagai Presiden (1966). Pemerintahan Parleментар tersebut berakhir ketika Jenderal **Ja'far Nimeiri** melakukan kudeta pada Mei 1969 dan memerintah Sudan hingga 1985. Pertentangan antar kelompok Utara-Selatan masih berlanjut dan mereda setelah tercapai persetujuan damai Addis Ababa tahun 1972 dan Sudan Selatan memperoleh otonomi.⁴

Pada tahun 1983 **Nimeiri** memberlakukan Hukum Islam dan ini ditentang oleh rakyat Sudan Selatan yang mayoritas pemeluk animisme dan Kristen. Selanjutnya **Jenderal Abdul Rahman Suar El Dahab** melakukan kudeta pada April 1985. **El Dahab** selanjutnya menyerahkan kekuasaan kepada pemenang Pemilu yaitu *Umma Party (UP)* dan *Democratic Unionist Party (DUP)*. Untuk yang kedua kalinya Sudan kembali menganut system pemerintahan parlementer di bawah PM **Sadiq Al Mahdi** dan Presiden **Ali Ahmed Mirghani** (1986-1989). Pemerintahan koalisi tidak dapat menyelesaikan konflik politik dan memadamkan pemberontakan rakyat Sudan Selatan pimpinan **John Garang** yang nyaris menghancurkan Sudan. **Brigjen Omer Hassan Ahmed Al Bashir** yang

⁴ *Ibid.*, hlm.2.

didukung oleh sejumlah perwira muda serta *National Islamic Front* (NIF) pimpinan **DR. Hassan Abdalla Turabi** melakukan kudeta tak berdarah pada 30 Juni 1989. Kudeta tersebut menghantar **Omer Hassan Ahmed El Bashir** ke puncak kekuasaan hingga sekarang.⁵

2. Geografi negara Sudan

Negara Sudan dikelilingi oleh rangkaian perbukitan misalnya perbukitan Jebel Marra di barat; pegunungan Kinyeti Imaton di sebelah Selatan didekat perbatasan Uganda dan Perbukitan Laut Merah disebelah Timur. Selain itu Sudan dilewati oleh pertemuan antara sungai Nil Biru dan Putih yang mengalir sepanjang 800 km terus melewati Mesir. Sudan Selatan memiliki iklim tropis yang sangat baik untuk pertanian. Musim penghujan berlangsung sekitar bulan Juli hingga September diwilayah Utara dan untuk di Selatan berlangsung selama 6 bulan yakni Juni hingga November. Dan jika musim kemarau datang biasanya dapat terjadi badai pasir yang dikenal sebagai "habbob".

3. Demografi negara Sudan

Negara Sudan memiliki 597 suku dan dengan 400 ragam dialek bahasa dan mereka terbagi menjadi dua komunitas yakni komunitas Arab dan non-Arab. Meskipun demikian jika dilihat dari segi fisik keduanya hampir sama. Perbedaan baru tampak dari segi bahasa dan adat istiadat mereka. Bagian Sudan Utara terdiri dari ratusan etnik dan suku. Hampir 22 juta orang Sudan yang tinggal di wilayah

⁵ *Ibid*

ini adalah orang Arab-berbahasa Arab dan ada juga bahasa tradisional yang dipergunakan oleh sebagian besar suku (Nubian, Beja, Fur, Nuban, Ingessana, dll). Ada beberapa suku lainnya seperti Kababish, Dongolawiyin, Ga'aliyin, Rubatab, Manasir, Shaiqiyah, Bideiria, penduduk semi nomaden Banggara di Kurdufan dan Darfur, Suku Beja di wilayah Laut Merah Dan Eritrea, Nubian di sekitar daerah utara Nil beberapa diantaranya berpindah ke Sungai Atbara, Shokraya di Butana, Bataheen diperbatasan Ga'allin. Ruffa, Halaween, Fulani dan masih banyak lagi yang berada di wilayah Gazerra dan di tepi sungai Nil Biru, Damazine dan Dindir. Suku Nuba di Wilayah selatan Kurdufan dan suku Fur di sebelah barat Sudan merupakan suku yang paling besar dari kelompok Non-Arab.

Menjadi hal yang sangat penting untuk membedakan warga Arab Sudan dari bangsa Arab Timur Tengah. Arab Sudan berasal dari nenek moyang Nubians. Nubian sendiri tidak diketahui secara jelas berasal dari kelompok etnik dan ras apa. Berabad-abad yang lalu terjadi imigrasi di Sudan, dan adanya perkawinan campuran antara suku Nubian dan Arab, bangsa Arab inilah yang mengajarkan Islam dan Bahasa Arab hingga berkembang seperti sekarang.

4. Ekonomi negara Sudan

Sudan sebelumnya dikenal sebagai negara yang sangat miskin dengan struktur sosial yang terbelakang, namun seiring dengan produksi dan ekspor minyak yang dilakukan sejak tahun 1999, pertumbuhan ekonomi Sudan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Tercatat pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan meningkat pada tahun 2006 menjadi

9,6%. Dunia menilai Sudan sebagai salah satu negara yang tercepat pertumbuhan ekonominya di Afrika (*Sudan is the one of the fastest growing economics in Africa*). Hal tersebut dimungkinkan karena Sudan mulai dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor dan mampu menarik investasi asing masuk ke Sudan di sektor-sektor strategis dan *profitable* seperti perminyakan. Sudan menganut system perekonomian bebas dan terbuka dengan menitikberatkan pada peran sektor swasta dalam kegiatan ekonomi dan proses pembangunan. Program pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk periode tiga tahunan dengan mengacu pada arahan IMF.⁶

Ekspor Sudan ke negara lain masih didominasi oleh *Petroleum* dan *Petroleum products*. Diindikasikan ekspor komoditi ini di tahun mendatang akan terus meningkat. Jika pada tahun 2002 produksinya baru mencapai 250 ribu bph dan pada tahun 2004 menjadi 340 ribu bph, maka pada tahun 2006 telah mendekati angka 500 ribu bph, dan akan terus ditingkatkan sampai pada posisi 800 ribu bph jika beberapa blok yang sedang dieksploitasi sudah dapat berproduksi secara penuh. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang terus berlangsung sebagian besar ditangani oleh konsorsium *Greater Nile Petroleum Operating Company/GNPO*⁷ dengan komposisi kepemilikan yaitu CNPC⁸-China

⁶*Ibid.*, hlm.5-6

⁷http://www.wikipedia.org/wiki/Greater_Nile_Petroleum_Operating_Company. GNPOC adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak di Sudan yang mulai menjalin kerjasama sejak 18 Juni 1997, diakses 26 Agustus 2008.

⁸http://www.en.wikipedia.org/wiki/China_National_Petroleum_Corporation. CNPC (*China National Petroleum Corporation*), adalah perusahaan minyak milik Negara Chins dsn merupakan perusahaan minyak terbesar kedua di dunia jika dilihat dari jumlah pekerja. CNPC mempunyai 30 proyek eksplorasi minyak antara lain di Azerbaijan, Canada, Indonesia, Venezuela, Myanmar, Oman, Peru, Sudan, Thailand, dan Turkmenistan, diakses 26 Agustus 2008.

dengan dengan saham 40%, Petronas Malaysia 30%, ONGC⁹-India sebesar 25% serta Sudapet¹⁰-Sudan sebesar sebesar 5%. Selain GNPOC juga ada sejumlah perusahaan swasta, termasuk konsorsium PETRODAR dan lainnya, baik lokal maupun asing yang turut berpartisipasi dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak Sudan. Berdasarkan penelitian para ahli, cadangan minyak yang dimiliki Sudan diperkirakan mencapai lebih kurang 3 miliar barel.¹¹

Selain minyak, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Sudan. Sekitar 40 persen dari pendapatan nasional berasal dari sektor pertanian. Beberapa produk pertanian terpenting untuk ekspor (*cash crop*) antara lain : kapas, sesame (wijen), sorghum, kacang tanah, biji bunga matahari (*sun flower seed*), dan getah Arab (*gum Arabic*) dimana Sudan merupakan pengekspor terbesar dunia saat ini. Sudan juga memiliki sejumlah hasil tambang, antara lain emas, chrome, gypsum dan nikel, namun baru tambang emas yang kini mulai digali secara komersial.¹²

Sektor industri, khususnya industri manufaktur, masih belum berkembang sehingga kebutuhan dalam negeri sebagian besar masih berasal dari impor. Perkembangan sektor industri mengalami kendala karena kurangnya permodalan

⁹[http://www.ongcindia.com/download/AnnualReports/ONGC_ALL_PAGES_LOWERS_PD F.pdf](http://www.ongcindia.com/download/AnnualReports/ONGC_ALL_PAGES_LOWERS_PD_F.pdf) . ONGC (*Oil and Natural Gas Corporation*) adalah perusahaan minyak di India dan merupakan perusahaan pertama dari India yang masuk majalah Fortune sebagai “World admired companies 2007”. ONGC telah menemukan sekitar 365 ladang minyak dan gas di India, diakses 26 Agustus 2008.

¹⁰ <http://www.sudapet.com.sd>). Sudapet (*Sudan National Petroleum corporation*) adalah perusahaan minyak milik Sudan yang didirikan pada tahun 1997. Sudapet mengontrol 5-20% produksi minyak setiap hari untuk di salurkan bagi kebutuhan dalam negeri, diakses 26 Agustus 2008.

¹¹<http://www.sudantribune.com/spip.php?article24533>. Sekarang Sudan memproduksi 500.000 barel per hari sehingga menjadikan Sudan produsen terbesar minyak di Afrika, diakses 26 Agustus 2008.

¹² CP. Sudan 2008, *Op.Cit*

dan lemahnya energi listrik. Hingga kini, Sudan masih mengalami krisis dan kelangkaan tenaga listrik nasional. Meskipun sejumlah proyek PLTA baru telah disetujui, namun pelaksanaannya masih tertunda. Satu-satunya industri yang mengalami perkembangan pesat adalah industri gula karena dukungan permodalan dari sejumlah negara Teluk dan perluasan ekspor, sehingga memungkinkan Sudan menjadi pengeksport gula terpenting di Timur Tengah dan kawasan Afrika Timur.

Gangguan keamanan nasional telah memaksa pemerintah menyediakan anggaran besar untuk pertahanan dan keamanan (*defence expenditure*) sekitar 27 persen dari total belanja negara sehingga mengurangi anggaran belanja untuk peningkatan kualitas SDM. Dampak lanjutan belum membaiknya situasi keamanan di Sudan juga berpengaruh pada masih lambannya arus masuk investasi asing ke Sudan di luar sector perminyakan. Kalangan investor asing sebagian besar masih menunggu dengan sikap hati-hati perkembangan penyelesaian masalah Sudan Selatan yang selalu bergejolak.

5. Sistem Politik dan pemerintahan Negara Sudan

a. Konstitusi Negara Sudan

Konstitusi pertama Sudan dibuat tanggal 12 April 1973, atau dalam era pemerintahan Presiden **Ja'far Nimeiri**. Namun pada April 1985 dibekukan oleh Jenderal **Abdurrachman Suar El Dahab** (Menteri Pertahanan) yang mengkuodeta Presiden **Nimeiri**. Konstitusi baru terbentuk setelah Bridgen **Omer Ahmad Al Bashir** tampil sebagai presiden. Sebelum

Konstitusi lama dibubarkan, Dewan Komando Revolusi Penyelamat Rakyat (*Al Inqaz Al Wathan*) menyusun Konstitusi baru yang berdasarkan Syariah Islam sebagai sumber hukum dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Tanggal 30 Juni 1998 Presiden **Al Bashir** memberlakukan Konstitusi baru setelah mendapatkan dukungan rakyat melalui referendum pada bulan Mei 1998.¹³

b. Sistem Pemerintahan Negara Sudan

Menurut Bab I pasal 2 Konstitusi baru 1998 menyebutkan bahwa, Republik Sudan adalah **negara Federal** dan menganut sistem pemerintahan **Presidensial**. Adapun sumber hukumnya adalah Hukum Islam (Syariah), Konstitusi dan *consensus* nasional. Dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu oleh 2 orang wakil presiden, menteri-menteri, menteri negara dan penasehat presiden setingkat menteri yang seluruhnya bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁴ Bab IV pasal 108 mengatur tentang pembagian Sudan menjadi 26 negara bagian/ propinsi yang dikepalai Wali (Gubernur). Pembagian wilayah tersebut dimaksudkan untuk memeransertakan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Sudan.

Setelah pembentukan Badan Legislatif dan Eksekutif di tingkat pusat (Khartoum) rampung dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2005, Wapres I

¹³ *Ibid.*, hlm.2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.3.

dan Kepala Pemerintahan Sudan Selatan, **Salva Kiir Mayardit** melalui Dekrit Kepresidenan No. 4 menetapkan 22 Kementerian untuk pemerintahan Sudan Selatan. Posisi kementerian tersebut akan mengakomodasi wakil *Sudan People's Liberation Movement* (SPLM), *National Congress Party* (NCP) dan Parpol Selatan. Berdasarkan *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) dan pasal 162 Konstitusi Interim Sudan tahun 2005 tentang Pemerintah Sudan Selatan, SPLM mendapat jatah 70 % untuk badan eksekutif, NCP 15% dan parpol selatan lainnya sebesar 15%. Menurut pasal 36-45 Konstitusi, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dan Panglima Angkatan Bersenjata. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem politik, hubungan luar negeri, keamanan negara dan Pemilu. Presiden juga mengangkat wakil presiden dan penasehat presiden. Presiden dipilih dari calon yang mendapat dukungan paling sedikit 50% suara dalam Pemilu dan masa jabatan selama 5 tahun tiap periode.¹⁵

Sudan memiliki dua Wakil Presiden yang masing-masing Wakil Presiden I akan menggantikan kedudukan Presiden jika berhalangan, sedangkan Wakil Presiden II dapat menggantikan Presiden bila Wakil Presiden I berhalangan. Dewan Menteri merupakan lembaga eksekutif, berwenang menetapkan peraturan pemerintah dan keputusan presiden.

¹⁵ *ibid*

Anggota Dewan Menteri diangkat oleh Presiden. Keputusan yang diambil didasarkan atas musyawarah atau suara mayoritas melalui voting.¹⁶

c. Sistem Kepartaian

Di awal pemerintahannya (1989) Presiden **Omer Hassan Ahmed Al Bashir** membubarkan seluruh partai politik dan untuk menampung aspirasi politik masyarakat dibentuk Kongres Nasional., yang selanjutnya menjadi partai yang berkuasa (*ruling party*) yaitu, Partai Kongres Nasional (*National Congres Party/ NCP*), dan diketuai oleh Presiden **El Bashir** dan **Dr. Hassan Abdalla Turabi** sebagai Sekjen. Pendirian NCP menimbulkan antipati **Dr. Hassan Abdalla Turabi** terhadap Presiden. Untuk menghindari dualisme kepemimpinan, Presiden **El Bashir** mengeluarkan Dekrit yang membubarkan Parlemen serta menghentikan **Turabi** sebagai Sekjen NCP. **Turabi** kemudian mendirikan Partai Kongres Rakyat Nasional/ PNCP dan bersama-sama dengan kelompok oposisi lain mengeritik pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan keterbukaan dan demokratisasi, Pemerintahan **El Bashir** memberlakukan undang-undang organisasi politik pada Januari 1999 yang menjamin kebebasan rakyat menyalurkan aspirasi politik mereka melalui partai-partai politik dan Undang-undang Pemilihan Umum pada tanggal 15 Mei 1999 untuk pemilihan anggota Parlemen dan Presiden.

¹⁶ *ibid.*

Dengan terbitnya kedua Undang-undang tersebut serta imbauan Pemerintah kepada tokoh-tokoh politik yang berada di pengasingan telah dapat menarik mereka kembali ke Sudan antara lain Ketua Partai Umma/ mantan Perdana Menteri, **Sadiq Al Mahdi** dan Mantan Presiden **Ali Ahmed Mirghani** dari Mesir pada tahun 2000 dan 2001.

Kelompok oposisi menilai Undang-Undang Dasar dan Undang-undang Pemilu 1999 tidak mencerminkan demokrasi, karena itu mereka memboikot Pemilu tanggal 13 – 22 Desember 2000 yang hanya diikuti oleh 3 dari 27 parpol yang terdaftar yaitu: Partai Kongres Nasional (PKN/ NCP), Front Penyelamat Demokrasi (FPD) dan Partai Serikat Pekerja (PSP). Partai-partai oposisi yang terdaftar tetapi tidak ikut dalam Pemilu antara lain; Partai Kongres Rakyat Nasional (PKRN/ PNCP), Partai Persatuan Penyelamat Demokrasi (PPD/ USDP), Partai Umma (PU/UP) Partai Arab Baath Jordan (PABJ/ JBAP), Partai Persatuan Sudan – Afrika (PPSA/USAP), Partai Kemerdekaan Nasional Sudan (SNFP), Partai Persatuan Demokrasi (PPD/ DUP), Partai Komunis Sudan (PKS/ SCP).¹⁷

6. Kebijakan Politik Luar Negeri Sudan

Sudan menganut politik luar negeri non-blok dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai serta menghormati kedaulatan dan non-intervensi. Sudan pun aktif dalam keanggotaan PBB dan badan-badan khususnya serta anggota berbagai organisasi internasional non-PBB dan regional

¹⁷ *ibid*

seperti GNB, OKI, AU, G-77, Liga Arab, IGAD¹⁸, SahilSahara Community¹⁹ dan COMESA²⁰.

Hubungan luar negeri Sudan ditekankan pada usaha memperkokoh hubungan dengan semua negara, khususnya negara-negara tetangganya untuk sepenuhnya bebas dari keterisolasian agar dapat meningkatkan peran dalam panggung politik internasional supaya bisa mencari dukungan banyak negara terhadap posisi Pemerintah dalam usaha penyelesaian masalah Sudan Selatan dan berperan serta dalam pembangunan nasional.

Meskipun sanksi PBB terhadap Sudan telah dicabut di tahun 2001 dan komitmen Sudan dalam pemberantasan terorisme, namun ia masih berusaha untuk menormalisasi hubungan dengan AS yang secara sepihak masih mengenakan sanksi ekonomi. Selain itu, AS masih mencantumkan Sudan dalam daftar 7 negara yang dicap mensponsori terorisme.

Sikap AS yang mendua (ambiguous) terhadap masalah Sudan dan cenderung lebih berpihak Kepada SPLA serta sikap negara-negara Barat/ maju yang mengkondisikan pencapaian persetujuan perdamaian untuk meningkatkan

¹⁸ IGAD (*intergovernmental Authority for Development*), merupakan salah satu organisasi yang memediasi ditandatanganinya perjanjian damai antara pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak di Sudan Selatan, lewat *protocol Machakos*. Hal ini dikarenakan mengingat prioritas kerja IGAD yang juga mencakup upaya pencegahan, manajemen, resolusi konflik serta upaya kemanusiaan. IGAD terbentuk atas prakarsa pemimpin Negara anggotanya dalam KTT luar Biasa di Addis Ababa, Ethiopia 18 April 1955 dan KTT berikutnya di Nairobi 21 Maret 1996.

¹⁹ *Sahil Sahara Community* atau *Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD)* adalah suatu sub organisasi Afrika yang bertujuan untuk meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan serta dapat meraih pembangunan ekonomi global maupun social. Organisasi ini didirikan pada tanggal 4 Februari 1998.

²⁰ COMESA (*Common Market for Eastern and Southern Africa*), didirikan pda tahun 1993 sebagai pengganti dari PTA (*Preferential Trade Area for Eastern and Southern Africa*). COMESA bertujuan untuk memperkuat proses integrasi ekonomi yang lebih baik.

kerjasama, mendorong Sudan untuk lebih memusatkan perhatian terhadap peningkatan kerjasama dengan negara-negara Asia termasuk Indonesia.

B. Dinamika konflik di negara Sudan

Perkembangan politik dalam negeri Sudan sampai saat ini masih diwarnai oleh upaya-upaya mencari penyelesaian konflik di Sudan Selatan, Sudan Timur. Sedangkan untuk konflik di Darfur akan dijelaskan secara khusus dalam bab ini.

1. Konflik di Sudan Selatan

Masalah Sudan Selatan merupakan produk politik pecah belah (*divide et impera*) kolonialisme Inggris yang membedakan perlakuan terhadap penduduk Utara yang mayoritas Islam dan dinilai lebih maju daripada Selatan yang mayoritas animis dan sedikit Kristen. Setelah Sudan memperoleh kemerdekaan dari Inggris tanggal 1 Januari 1956 muncul keinginan Utara untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan falsafah Negara, namun ditentang oleh rakyat Sudan Selatan. Dalam tahun-tahun pertama kemerdekaan, Pemerintah mencoba menerapkan pemerintahan parlementer ala Inggris, namun gagal. Meskipun konflik politik berlanjut, namun selama periode 1965 – 1972 terjadi dialog-dialog antara Pemerintah dengan pemberontak yang kemudian menyepakati *Addis Ababa Agreement* (A.A.A) tahun 1972 dan Pemerintah Presiden **Ja'far Nimeiri** memberikan otonomi Kepada Sudan Selatan. Namun tahun 1983 pemberontakan muncul kembali karena Presiden **Ja'far Nimeiri** memberlakukan hukum Islam, yang ditentang oleh rakyat Sudan Selatan. Antipati rakyat Sudan Selatan terhadap

Pemerintah mendorong **John Garang** dan beberapa kelompok pemberontak tergabung dalam *Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A)*.²¹

Mulai tahun 2001, Pemerintah Sudan atas mediasi IGAD melakukan perundingan dengan pemberontak Sudan Selatan yang dianggap sebagai salah satu tantangan paling berat dalam mewujudkan pembangunan. Pada tanggal 9 Januari 2005 di Nairobi telah ditandatangani persetujuan pengakhiran konflik di Sudan Selatan (*Comprehensive Peace Agreement/CPA*) yang meliputi *power sharing*, *wealth sharing* dan referendum yang telah berlangsung dan menyelesaikan konflik antara Wakil Presiden Sudan **Ali Osman Mohamed Taha** dengan Pemimpin Sudan *People's Liberation Movement/Army (SPLM/A)*, **Dr. John Garang**. Isi perdamaian tersebut di antaranya:

- a. Enam tahun masa transisi bagi Sudan Selatan untuk persiapan Referendum apakah Sudan Selatan ingin berpisah dengan Sudan atau tetap bersatu
- b. dan pembagian kekuasaan serta pembagian hasil eksplorasi minyak di Sudan Selatan masing-masing mendapat 50%.²²

Implementasi kesepakatan damai *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* yang ditandatangani 9 Januari 2005 oleh Pemerintah pusat dan Sudan Selatan belum dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan. Masalah-masalah seperti *wealth sharing* dan *security and military arrangement* serta rehabilitasi Sudan Selatan kurang mendapatkan perhatian pemerintah Pusat. Hal demikian diperburuk oleh kebijakan pemerintah Pusat yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Sudan Selatan seperti masalah status ibukota Khartoum, kasus

²¹ CP. Sudan 2008., *Op.Cit*

²² UN Year Review 2005," Sudan : New mission deploys, provides assistance to the African Union in Darfur", hlm 11.

perbatasan Sudan Utara-Selatan di daerah Obyei dan masalah dana pembangunan Sudan Selatan serta pembagian hasil minyak. Selain itu, tuduhan pihak Selatan terhadap pemerintah yang menilai pemerintah masih mendukung keberadaan kelompok pemberontak Uganda di Sudan Selatan.

Kendala lainnya adalah beberapa faksi *Sudan People's Liberation Movement* (SPLM) yang menentang kesepakatan damai tersebut sering memicu situasi di wilayah tersebut khususnya antara pasukan SPLM yang mengakibatkan sekitar 200 orang korban meninggal akibat kesalahpahaman yang terjadi antara faksi-faksi yang berada di wilayah tersebut.

Hambatan lain yang muncul adalah munculnya saling ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Kelompok SPLM menilai pemerintah pusat tidak sungguh-sungguh merealisasikan kesepakatan yang telah ditandatangani kedua pihak sementara pihak pusat menuduh kelompok SPLM lebih cenderung untuk memisahkan diri dari Pemerintahan Sudan Bersatu pada referendum nanti.

Konflik yang diperkirakan akan muncul ke permukaan setelah referendum 2011 nanti jika Sudan Selatan memisahkan diri adalah masalah perbatasan Sudan Utara dengan Sudan Selatan yang diperkirakan memakan waktu lama mengingat para penduduk di wilayah tersebut terbagi kepada suku Nuer dan di utara khususnya suku-suku yang berafiliasi Arab. Konflik tersebut akan sangat mungkin terjadi mengingat garis perbatasan hingga saat ini belum disepakati oleh

kedua pihak. Akibatnya kedua pemerintah akan menghadapi konflik di perbatasan di masa mendatang.²³

Tabel 4, key fact Southern Sudan²⁴

<i>No. of southern Sudanese displaced in Sudan</i>	<i>4 million (WFP, 2006)</i>
<i>No. returned to southern Sudan since launch of voluntary repatriation programme two years ago</i>	<i>100,000 (UNHCR, Jan 2007)</i>
<i>No. estimated to return in 2007</i>	<i>125,000 (UNHCR, Jan 2007)</i>
<i>Regional gross national income</i>	<i>\$90 per capita (less than 10 percent of national average) (WFP, 2006)</i>
<i>Percentage in south Sudan earning less than \$1 a day</i>	<i>90 (WFP, 2006)</i>
<i>No. of children demobilised from rebel forces since 2001</i>	<i>20,000 (UNICEF, 2006)</i>
<i>Maternal mortality rate in S. Sudan</i>	<i>2,030 per 100,000 births - highest rate in world (UNFPA, 2007)</i>

Gambar 1, Peta negara Sudan²⁵

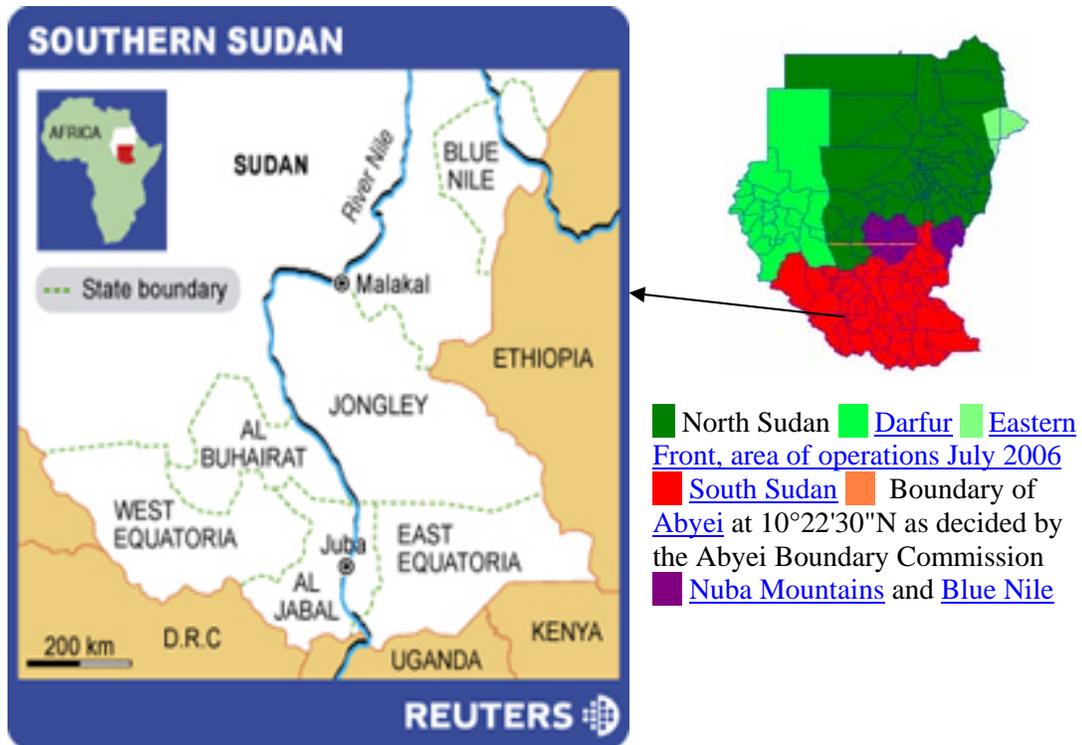


²³ CP Sudan 2008., *Op. Cit.*

²⁴ <http://www.alertnet.org/> "Refugees Head Back to Oil-Rich Region", diakses 24 April 2008.

²⁵ www.wikipedia.org/ "sudan-map", diakses 20 Mei 2008.

Gambar 2, Peta wilayah Sudan Selatan²⁶



2. Perkembangan terakhir konflik di Sudan Selatan

Terhitung sejak dari tanggal 12-14 Mei 2007 di Khartoum, Sudan telah berlangsung pertemuan intensif Komisi Eksekutif *Sudan People's Liberation Movement (SPLM)* dan *National Congress Party (NCP)*. Pertemuan dimaksud adalah untuk menindaklanjuti beberapa pertemuan sebelumnya dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan CPA dan menyelesaikan *pending matter* yang belum membuahkan kesepakatan akhir. Pertemuan dimaksud lebih menekankan pada permasalahan teknis sebagai penunjang pelaksanaan CPA.

²⁶ Refugees Head Back to Oil-Rich Region., *Op.Cit.*

Pada tanggal 16 September 2007, Presiden **Omer Hassan Ahmed El Bashir**, Wapres I **Salva Kiir Mayardit** dan Wapres II **Ali Osman Mohamed Taha** serta Menteri Negara di Kepresidenan mengadakan pertemuan terbatas guna membahas berbagai masalah yang selama ini sering muncul ke permukaan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kesepakatan damai *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* yang antara lain terdiri atas masalah perbatasan Abyei, *power sharing dan wealth Sharing* serta *Security and military sharing*. Selain itu, pertemuan ketiga pejabat tinggi tersebut juga mempelajari tentang kinerja Komisi Demarkasi Utara-Selatan yang sejak tahun lalu (2006) telah mulai bekerja namun sampai dengan saat ini belum merampungkan tugasnya berupa antara lain pembuatan marka-marka perbatasan Utara-Selatan. Pembahasan tentang garis perbatasan termasuk negara-negara bagian yang akan dilewati oleh garis perbatasan tersebut akan disesuaikan dengan garis perbatasan tahun 1956 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Inggris.

Pada tanggal 18 Oktober 2007, Presiden **Omer Hassan Ahmed El Bashir** mengangkat dan mengambil sumpah menteri-menteri baru yang merupakan wakil-wakil dari *Sudan People's Liberation Movement (SPLM)*. Keputusan untuk reshuffle kabinet dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2007 untuk mengakomodasi langkah politik yang diambil oleh SPLM yang merencanakan akan membekukan kemitraannya dengan National Congress Party (*NCP-rulling party*) dan sekaligus sebagai bentuk protes dan tuduhan bahwa NCP tidak

konsisten terhadap implementasi beberapa protokol yang telah ditandatangani dalam CPA oleh kedua pihak pada 9 Januari 2005.²⁷

3. Konflik di Sudan Timur

Pemberontakan di Sudan Timur tidak segenar pemberontakan yang ada di Sudan Selatan dan Sudan Barat, karena para pemberontak rata-rata berasal dari oposisi Sudan Utara yang mengambil basis perjuangan di Sudan Timur. Setelah Pemerintah Sudan mengadakan rekonsiliasi dengan partai-partai oposisi utara, pemberontakan di wilayah tersebut sudah menurun. Pada awal tahun 2006, Pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak di Sudan Timur juga menandatangani kesepakatan damai yang intinya memberikan peluang bagi rakyat Sudan Timur untuk menduduki jabatan strategis di negara-negara bagian yang ada di Sudan Timur dan Pemerintah Sudan akan konsisten mengalihkan dana sekitar 60 juta dollar per tahun ke Sudan Timur dan akan ditingkatkan di masa-masa mendatang.²⁸

²⁷ CP Sudan 2008., *Op.Cit.*

²⁸ *Ibid.*, hlm.15.

Tabel 5, key facts Eastern Sudan²⁹

<i>Annual income per capita (2004)</i>	<i>Red Sea state: \$93 Kassala state: \$156 (U.N. 2005)</i>
<i>Percentage of villages with access to healthcare</i>	<i>Red Sea state: 20 Kassala state: 50 (U.N. 2005)</i>
<i>Percentage children malnourished</i>	<i>Kassala state: 44 Red Sea state: 38.5 (U.N. 2005)</i>
<i>Percentage of children reported ill within a 2-week period (Kassala state)</i>	<i>53.6 (U.N. 2005)</i>
<i>Child mortality rate</i>	<i>1.07 per 10,000 per day (U.N. 2005)</i>
<i>Number of internally displaced people (2006)</i>	<i>395,000 (<u>Internal Displacement Monitoring Centre</u>)</i>
<i>Number of refugees (2006)</i>	<i>145,000 (<u>UNHCR Global Appeal 2007</u>)</i>

Gambar 3, Peta wilayah Sudan Timur³⁰



²⁹<http://www.alertnet.org/> , Rebel threat in impoverished east, diakses 24 April 2008.

³⁰ *ibid*

4. Perkembangan Terakhir Konflik di Sudan Timur

Pada tanggal 15 Mei 2007 telah berlangsung pertemuan segitiga antara *East Front* (pemberontak Sudan Timur) dan Partai Kongres Nasional (*rulling party*) yang difasilitasi oleh Pemerintah Eritrea di Asmara, Eritrea pada tanggal 14-15 Mei 2007.

Adapun hasil yang dicapai dalam perundingan dimaksud antara lain sebagai berikut:³¹

- a. Penyerahan nama-nama calon pejabat yang akan memegang jabatan penting di Pemerintahan Persatuan Nasional Sudan dari pihak *East Front* kepada Delegasi Pemerintah Persatuan Nasional Sudan melalui Pemerintah Eritrea sebagai fasilitator perundingan perdamaian Sudan Timur.
- b. Penegasan kembali terhadap beberapa posisi yang akan diberikan kepada *East Front* oleh Pemerintah Sudan
- c. Penegasan kembali terhadap 2 butir kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya yaitu dibentuknya kotak pembangunan Sudan Timur dan penggabungan unsur-unsur East Front sebanyak 5.000 orang yang terdiri dari sektor angkatan bersenjata, keamanan dan kepolisian
- d. Penentuan peta prioritas pelaksanaan kesepakatan dan program kerja kedua belah pihak di masa mendatang.
- e. Penentuan pelantikan calon pejabat yang akan menduduki posisi-posisi

C. Konflik di Sudan Barat (Darfur)

Konflik yang terjadi di Sudan Barat mulai mencuat sekitar tahun 2003. Konflik ini diduga merupakan imbas dari pemberian otonomi untuk wilayah Sudan Selatan. Dimana pihak oposisi pemerintah lewat **Al Turabi** memprofokasi masyarakat Darfur dengan mengangkat isu marginalisasi pemerintah terhadap wilayah tersebut selama ini. Hal ini ternyata menimbulkan gerakan pemberontakan di Darfur.

³¹ CP Sudan 2008., *Op.Cit.*

1. Latar belakang konflik di Darfur

Darfur merupakan bagian dari kota kecil di Sudan, yang terletak di sebelah Barat. Darfur dibagi dalam tiga wilayah: Utara (ibu kota Al Fashir), Selatan (ibu kota Nyala) dan Barat (ibu kota Al-Jenina). Darfur terletak di barat laut dari wilayah Sudan, dimana sebelah barat berbatasan dengan Chad, dengan Libya disebelah barat laut dan berbatasan dengan Republik Afrika Tengah disebelah selatan.

Darfur, yang berarti tanah (suku) Fur, mempunyai luas hampir sama dengan Perancis atau Kalimantan, atau seperlima Sudan, yang luasnya lebih dari 2,5 juta km². Sejak abad ke-15, Darfur merupakan wilayah merdeka yang dipimpin sultan. Pada 1822 Darfur diduduki Turki dan disatukan dengan bagian Sudan lainnya. Ketika Sudan menjadi negara merdeka sejak 1 Januari 1956, Darfur tetap menjadi bagian Sudan. Hampir seluruh penduduk Darfur memeluk Islam. Mereka terbagi menjadi lebih dari 80 suku, yang dikelompokkan menjadi:³²

- a. Kelompok Arab, terkadang disebut Baggara, terdiri a.l. dari suku Rizaigad, Mahariya, Irayqat dan Habaniya. Mereka kebanyakan kaum pendatang pada abad 13, menetap di Darfur Utara dan Darfur Selatan, sebagai peternak/penggembala sapi dan kambing yang berpindah-pindah (nomad).
- b. Kelompok non-Arab, yang disebut Afrika hitam, terdiri dari suku Fur (paling besar), Zaghawa (paling terlatih secara militer) dan Massalit, Tunjur, Bergid dan Berti. Umumnya mereka mendiami Darfur Tengah dan Darfur Barat. Mereka kebanyakan hidup dari bercocok tanam, kecuali suku Zaghawa yang banyak menjadi penggembala onta. Suku Zaghawa terbagi dalam dua kelompok, Zaghawa Tuer, yang lebih condong sebagai pendukung SLM, sedangkan Zaghawa Kube lebih mendukung JEM.

³²Abdul Hadi Adnan, *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*. (Angkasa: Bandung, 2008) hlm 124-125.

Kelompok Arab dan non-Arab sudah banyak melakukan kawin campuran sehingga sulit untuk membedakan, karena warna kulit mereka hampir sama hitam. Perbedaan baru nampak dari adat-istiadat dan bahasa mereka. Seringkali Darfur dilanda konflik. Konflik dapat terjadi di antara etnik (Arab Vs Afrika) sehingga konflik pada fase tertentu tidak berdimensi etnik. Dahulu telah terjadi Konflik tradisional kemudian semacam mengarah ke konflik antaretnik ketika pemerintahan **Shadiq al- Mahdi** melatih dan mempersenjatai milisi “Murahiliin” dari etnik Baggara, untuk menghadapi pemberontak Sudan Selatan (SPLM/A), yang mencoba masuk Darfur. Kerja sama antara Khartoum dan Murahiliin ini berlanjut pada masa presiden **Bashir**. Di pihak lain, para milisi dari etnik Fur, Zaghawa dan Massalit pada 2001 bergabung dalam satu gerakan. Mereka mendapat latihan militer dari kelompok Zaghawa, yang sebelumnya telah mendapat latihan dari tentara Sudan dan Chad. Mereka mempersenjatai diri, dengan senjata-senjata yang dibeli/ diselundupkan dari Chad dan Libya. Maka konflik antarmilisi pun makin sering dan berskala lebih besar. Gerakan itu kemudian menamakan diri sebagai “Front Pembebasan Darfur” atau *Darfur Liberation Front (DLF)*. Sebulan setelah mereka melancarkan serangan ke Golo, Jabal Marra, Februari 2003, pimpinan gerakan menemui **John Garang** (pemimpin SPLM/A) di Rumbek. Setelah pertemuan itu DLF diubah namanya menjadi SLM/A, yang mengedepankan visi “Sudan Baru”, yang pro persatuan, demokrasi, sekularisme dan persamaan antara semua warga negara. Sehingga

bayak yang berpendapat krisis Darfur dipengaruhi dan di dukung oleh pemberontak di Sudan Selatan.³³

Krisis di Darfur pada dasarnya merupakan konflik internal Sudan namun berimbas ke negara tetangga, khususnya Chad. Krisis ini mencakup aspek militer, sosial-ekonomi dan etnis:³⁴

- a. Antara 1968-98 terjadi 29 konflik senjata dalam skala dan intensitas kecil, dengan perincian: tiga kali antara 1968-76, lima kali antara 1976-80 dan 21 kali antara 1980-98. Penyebab konflik terutama karena perebutan sumber daya alam, yang menyangkut air dan ladang peternakan/bercocok tanam. Konflik tersebut bisa terjadi antarsuku maupun intersuku.
- b. Pada bulan Februari 2003 dua kelompok pemberontak yang menamakan diri SLM/A dan JEM menyerang posisi-posisi militer Sudan dan pemerintahan wilayah Darfur. Dengan sendirinya Pemerintah Sudan balik menyerang kembali para pemberontak. Sebenarnya banyak anggota pasukan Sudan yang berasal dari Darfur. Ketika Sudan Selatan memberontak, terbentuklah para milisi untuk memperkuat sistem keamanan setempat. Mereka inilah yang merasa tidak puas terhadap perlakuan Khartoum.
- c. Dimensi politik: para elit di Darfur melihat bahwa dengan melakukan pemberontakan, kemungkinan mereka dapat menarik keuntungan politis, seperti yang juga dilakukan oleh SPLM/SPLA di Sudan Selatan. Karena itu dari segi *timing*, krisis di Darfur ini pecah tidak lama setelah tercapai penyelesaian masalah Sudan Selatan.
- d. Aspek sosial-ekonomi: kondisi sosial-ekonomi Darfur sungguh sangat menyedihkan. Kekeringan selama 30 tahun melanda daerah gurun pasir yang dihuni 6 juta orang. Padahal kebanyakan penduduk hidup dari pertanian dan peternakan. Tanpa konflik bersenjata pun mereka hidup sengsara. Air merupakan komoditas langka, termasuk di kota seperti Al Fashir, Nyala dan Al-Jenina. Sekecil apapun pergolakan bersenjata akan tambah menyengsarakan penduduk Darfur.
- e. Aspek kesukuan/etnis: konflik di antara sebagian dari 80 suku di Darfur yang hampir seluruhnya beragama Islam, tidak dapat dikategorikan sebagai *ethnic cleansing* karena dalam konflik Darfur ini yang terlibat bentrokan adalah sesama muslim. Bahkan konflik inter-etnik pun terjadi. Menjelang putaran terakhir perundingan di Abuja 2006, kelompok SLM bentrok dengan JEM, agar jika ada penyelesaian politik maka kelompok pemberontak yang lebih menonjol akan beroleh posisi yang lebih baik.

³³ *Ibid.*, hlm.126.

³⁴ *ibid*

2. Kelompok-kelompok yang bertikai di Darfur

Kelompok pemberontakan internal seperti yang disebutkan dalam kerangka teoritis di bab I bisa terjadi akibat ketidakpuasan terhadap perilaku pemerintah atas aspirasi yang tidak terakomodasi. Atau merupakan gerakan separatis atau pembebasan seperti yang terjadi di Darfur. Adapun kelompok yang bertikai di Darfur antara lain:

a. Janjaweed

Janjaweed (Janjawid, Janjawed, Jingaweit, Jinjaweed, Janjawiid, Janjiwid, Janjaweit), berarti "*a man with a gun on a horse*", "*devil on horseback*", or "*a man on a horse*") julukan tersebut biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sebagian besar tentara yang memegang senjata di Darfur. Berdasarkan definisi dari PBB, Janjaweed terdiri dari warga nomaden Arab yang berbahasa Afrika yang biasa disebut (i.e. *Black Arabs, or Afro-Arabs*). Kelompok ini telah lama memiliki konflik dengan warga Non Arab yang sama-sama beragama Islam. Kelompok Janjaweed inipun memiliki konflik dengan kelompok pemberontak Darfur seperti SLM/A atau JEM. Sehingga dimensi konfliknya tidak lagi berdasarkan religi.

Menurut etimologinya, Janjaweed berasal dari bahasa Persia, yang artinya "*war*" dan jangawee "pejuang". Kata ini diadopsi oleh Mahdist di Sudan sejalan dengan kata Mahdi. Kemudian diadaptasi

menjadi bahasa Arab yang diartikan "*Faith Warrior/* pejuang kebenaran".³⁵ Pasukan Janjaweed terdiri dari partisipan warga Darfur. Hal tersebut terjadi di tahun 1990, 2001-2005. Pertama kali Janjaweed muncul di tahun 1988. Sekitar tahun 1990an, Janjaweed merupakan gabungan antara para pemberontak Chad dan rakyat Darfur-Arab. Kelompok ini didukung oleh pemerintah Sudan dengan tujuan untuk mengawasi tanah. Pada tahun 1999-2000, dengan semakin meningkatnya situasi di bagian Selatan dan Timur Sudan maka pemerintah mempersejatai milisi Arab Janjaweed untuk membantu mengatasi konflik yang muncul di Darfur. Ketika di tahun 2003 eskalasi konflik kembali mencuat akibat pengeboman ke Golo, Jebel Marra oleh kelompok pemberontak Sudan yang muncul akibat rasa tidak puas oleh perlakuan Khartoum yang tidak adil di Darfur, maka Janjaweed ditugaskan untuk menyerang dan mengamankan area Darfur. Janjaweed yang terkenal kekejamannya dengan retorika rasismya, melakukan pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan mengusir penduduk dari rumahnya.

Kelompok ini dipimpin oleh kepala suku dan yang paling berpengaruh disebutkan adalah **Musa Hilal**. Ia adalah kepala suku untuk wilayah Darfur Utara. **Musa Hilal** menganggap apa yang dilakukannya adalah "Jihad", Ia tidak ingin dikaitkan dengan

³⁵ Dokumen Deplu, Direktorat Timteng. "War in Sudan".

pemerintah. Akan tetapi keterkaitannya tidak bisa dipungkiri ketika HRW menyebutkan dalam laporannya bahwa pemerintah administratif Darfur Utara memberikan instruksi pada kelompok **Musa** pada tanggal 13 Februari 2004 untuk membentuk "security unit" yang diperuntukkan untuk melindungi area Darfur Utara dan pada akhirnya kelompok inilah yang menjadi basis milisi pemerintah yang dikenal dengan Janjaweed.³⁶

Kebanyakan para pemimpin Janjaweed adalah berasal dari kepala suku Arab yang berada di Darfur. Berikut adalah daftar nama pemimpin Janjaweed³⁷

- 1). Sheikh Musa Hilal: koordinator Janjaweed dan Buffalo Brigade (Liwa el Jamous) commander
- 2). Hamid Dawai: Brigadir Janjaweed, pemimpin Terbeba-Arara-Beida. Emir of the Beni Halba tribe and Janjaweed leader, dia bertanggungjawab pada aksi di Terbeba-Arara-Bayda triangle dimana 460 orang antara bulan Agustus 2003 dan April 2004 telah terbunuh. Ia bertempat tinggal di Geneina dan Bayda, Sudan.
- 3). Abdullah Mustafa Abu Shineibat: Habila dan Foro area Burunga. Pemimpin suku Beni Halba dan pemimpin Janjaweed di wilayah Habila-Murnei.
- 4). Omada Saef: di wilayah Geneina dan Misterei. Omda suku Awlad Zeid dan pemimpin Janjaweed dari Geneina sampai Misterei. Tetapi telah ditahan di Geneina.
- 5). Omar Babbush: wilayah Habila dan Foro Burunga. Omda dari suku Misseriya dan pemimpin Janjaweed dari Habila sampai Foro Burunga. Ia telah ditahan di Foro Burunga.

³⁶ <http://hrw.org/backgrounders/africa/072004darfur.pdf>. Darfur Documents Confirm Government Policy of Militia Support *A Human Rights Watch Briefing Paper, July 20, 2004*, diakses 19 Mei 2008.

- 6). Ahmed Dekheir: Wilayah Murnei. Ia adalah omda dari suku Ma'alia dan pemimpin Janjaweed di Murnei.
- 7). Ahmed Abu Kamasha: diwilayah Kailek

Human Right Watch, pada 27 Agustus 2004, melaporkan bahwa Kamp-Kamp Janjaweed di Darfur masih aktif.

Tabel 6, Nama-nama Kamp Janjaweed di Darfur ³⁸

Nama kamp	Lokasi	dibuka
Kurgue	85 km barat Kuntum, di timur kamp Funu, Darfur Barat	Juni 2004
Ustani	Sebelah barat Serif Omra, diantara Geineina dan Kebkabiya	Juni 2003
Jabel Kaya	30 km ke Timur antara Geneina dan Hashaba, Darfur Barat, dipegunungan	Juni 2003
Girgigirgi	85 km ke Timur laut dari Geneina, Darfur Barat	September 2003
Damra Sheikh Abdel Bagui	10 km dari Timur Kuntum, Darfur Utara	November 2003
Masry	7 km barat daya Kuntum, Darfur Utara	Agustus 2003
Milla	75 km timur laut Kebkabiya, Darfur Utara	Akhir 2003
Um Sayala	20 km timur Kuntum, 5 km barat Um Hiaye, Darfur Utara	Akhir 2003
Funu	Sebelah barat Kuntum, Darfur Barat	Januari 2004
Um Heglig	Timur laut Mellit, Darfur Utara	Januari 2004
Kuma	60 km El Fasher, Darfur Utara	Pertengahan 2004
Abu Jidad	60 km Karnoi, Darfur Barat	Mei 2004
Isharaya	75 km barat Kuntum, 3 km utara Buram, Darfur Selatan	15 Mei 2004
Taisha	17 km timur dari Nyala, barat dari Labadu, Darfur Selatan	Juli 2004
Assalaya	Timur Nyala, 5 km utara basis militer pemerintah Sudan, Darfur Selatan	Juli 2004
Razzalah Jawazat	Timur dari Nyala, 8 km barat dari Ed Da'eim, Darfur Selatan	Juli 2004

b. Justice and Equality Movement (JEM)

Justice and Equality Movement (JEM) adalah salah satu kelompok pemberontak yang disponsori oleh muslim Darfur. JEM

³⁸ www.hrw.org, "Janjaweed Camps Still Aktive, Sanction Urged for August 30 Deadline"

dipimpin oleh **Khalil Ibrahim Muhammad**. Ia adalah pengarang dari buku "*The Black Book: Imbalance of Power in the Sudan*" mengenai ketidakseimbangan warga arab dalam posisi penting yang dipublikasikan di tahun 2000. Bersama-sama dengan kelompok pemberontak SLM/A(*Sudan Liberation Movement /Army*) mereka melawan militansi Janjeweed yang didukung pemerintah. JEM juga merupakan bagian dari Front Sudan Timur, sebuah gerakan yang aktif di wilayah timur Sudan yang berbatasan dengan Eritrea.³⁹

JEM berideologikan nilai-nilai Islam, dan mereka memiliki hubungan dengan kelompoknya **Hassan al-Turabi** meskipun **Hassan** sendiri menyangkal claim tersebut. Akan tetapi **al-Turabi** ikut menyalahkan pemerintah akan situasi buruk di Sudan. Tanggal 20 Januari 2006 JEM mengumumkan penggabungan dirinya dengan SLM/A, bersama dengan kelompok lainnya mereka membentuk *the Alliance of Revolutionary Forces of West Sudan* (Aliansi revolusioner bagi Sudan Barat). Bagaimanapun juga JEM dan SLM/A sama-sama berunding sebagai kelompok yang terpisah dalam pembicaraan perdamaian dengan Pemerintah Mei 2006. Namun pada akhir Mei ditahun tersebut pula mereka kembali berdiri sendiri.⁴⁰

³⁹ www.bbc.com. "Who Are Sudan's Darfur Rebels?", diakses 17 Agustus 2008.

⁴⁰ War in Sudan, *Op. Cit.*

Pada Oktober 2007, JEM menyerang sumber minyak Delra di Kordofan, Sudan sebuah perusahaan Minyak terbesar di sepanjang sungai Nil yang dikuasai oleh China. Namun beberapa bulan berikutnya pemerintah China telah kembali mengirimkan teknisinya untuk bekerja. JEM beranggapan bahwa keuntungan yang didapat dari perusahaan ini dipergunakan pemerintah pusat untuk mendukung aksi Janjaweed. Pada tanggal 11 Desember 2007, **Khalil Ibrahim** mengklaim telah menyerang instalasi perusahaan minyak China sebagai bagian usaha JEM untuk mengusir perusahaan minyak China dari Sudan.⁴¹

Faksi JEM tidak selamanya kompak karena muncul beberapa orang dari JEM yang merasa kecewa atas kepemimpinan **Khalil Ibrahim** yang dianggap memarginalisasikan kaum non- Kobe Zaghawa (Zaghawa adalah suku **Khalil**). Seperti **Idris Azraq** yang keluar dari JEM ditahun 2007, dan munculnya kelompok-kelompok baru seperti NMRD (*The National Movement for Reform and Development*) di tahun 2004. NMRD diketuai oleh pendiri JEM sebelumnya yakni **Jibril Abdel Karim Bari**, biasa dipanggil dengan **Tek. Tek** termasuk daftar pelanggar kejahatan perang menurut PBB. Selain itu, pecahan JEM yang tidak terlalu dikenal misalnya Jem

⁴¹ *ibid*

Peace Wing, Field Revolutionary Command, dan Popular Forces Troops.⁴²

c. National Redemption Front (NRF)

National Redemption Front (NRF) adalah aliansi kelompok perjuangan di Darfur. Berdasarkan deklarasinya, NRF terdiri dari JEM, SLM/A, *the Sudan Federal Democratic Alliance* (SFDA). NRF menentang *Darfur Peace Agreement (DPA)*, yang ditandatangani oleh SLM/A yang diketuai **Minni Mannawi** dan pemerintah Sudan pada bulan Mei 2006. Kelompok ini diketuai oleh **Ahmed Diraige** ketua dari SFDA.⁴³ NRF mewakili bagian substansial dalam pertikaian di Darfur. Uni Afrika, GoS dan pihak-pihak lain dalam DPA tidak terlalu mengakui sikap abstain dalam penandatanganan perjanjian tersebut.

d. Sudan Liberation Movement/ Army (SLM/A)

Sudan Liberation Movement/Army atau (*ḥarakat taḥrīr as-Sūdān*) (SLM or SLA) adalah sebuah milisi keamanan yang dipimpin oleh ethnic Fur. Gerakan milisi ini terbentuk di tahun 1987 akibat pemerintah Sudan lewat tentara keamanannya menekan komunitas Non- Arab seperti etnik Fur, Massalit, Zaghawa. Kemudian ditahun 2003 disaat meningkatnya isu pemberontakan untuk mendapatkan

⁴² Who Are Sudan's Darfur Rebels?, *Op. Cit*

⁴³ *ibid*

keadilan yang sama dengan komunitas Arab kelompok milisi ini membentuk *Darfur Liberation Front* (DLF). DLF dibulan Maret 2003 berubah nama menjadi *the Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A).⁴⁴

Sekarang SLM/A terbagi menjadi dua faksi. Faksi terbesar adalah faksi SLM-**Minni Minnawi** dan sekarang berkerjasama dengan pemerintah dan mengontrol tentara militer. Sedangkan faksi yang lebih kecil yang menjadi oposisi pemerintah beranggotakan antara lain: **Ahmad Abdulshafi Bassey** dan **Abdel Wahid Mohamed Ahmed el-Nur** mengontrol sayap politik. Faksi SLM-**Abdel Wahid** lebih didukung oleh rakyat Darfur akibat Faksi **Minni Minnawi** ikut menandatangani DPA **Abdel Wahid** menolak menandatangani DPA 2006 dan mengatakan ia tidak akan menandatangani perundingan damai di Libya. SLM juga terbagi dalam beberapa faksi lain yang dikenal dengan SLM-*Unity Faction* yang dipimpin oleh **Abdallah Yahya** (dari etnik Zaghawa di Darfur Utara). SLM-Unity ini disalahkan untuk beberapa tindakan kekerasan yang terjadi di Darfur, termasuk penyerangan 29 September 2007 terhadap markas UA didekat Haskanita, yang menewaskan 10 tentara UA. Pecahan SLM yang lain

⁴⁴ War in Sudan, *Op. Cit.*

contohnya *The Greater Sudan Liberation Movement/ Army; Free Will;* dan *The National Movement for Elimination of Marginalization.*⁴⁵

Perkembangan konflik di Darfur telah memakan jumlah korban yang sangat banyak dan menurut perkiraan PBB yang telah menjadi korban konflik hingga tahun 2007 mencapai 4, 1 Juta jiwa lebih lengkapnya lagi seperti yang digambarkan dalam tabel 7.

Tabel 7, *The United Nations has described Sudan's western Darfur Key facts*⁴⁶

(Unless otherwise stated, data is for July 2007, taken from the Darfur Humanitarian Profile series issued by the United Nations)

<i>Total no. of people affected by conflict:</i>	<i>4.1 million</i>
<i>No. of internally displaced people in Darfur:</i>	<i>2.2 million</i>
<i>No. of Darfur refugees in Chad:</i>	<i>240,000 (UNHCR, December 2006)</i>
<i>Residential population affected by conflict:</i>	<i>1.78 million (U.N. report, Jan 2007)</i>
<i>No. of people receiving food aid:</i>	<i>2.3 million</i>
<i>Percentage of affected population accessible according to U.N. security standards:</i>	<i>73 percent</i>
<i>No. of humanitarians on the ground (national and international):</i>	<i>12,100</i>
<i>No. of humanitarian agencies supporting Darfur population:</i>	<i>75 NGOs (including Red Cross/Red Crescent); 14 U.N. agencies</i>
<i>Malnutrition (acute):</i>	<i>13.1 percent (2006 - up from 11.9 percent in 2005) (U.N. report, Jan 2007)</i>
<i>Mortality:</i>	<i>0.36 per 10,000 people per day (2006) (U.N. report, Jan 2007)</i>

⁴⁵ Who Are Sudan's Darfur Rebels?, *Op. Cit*

⁴⁶ <http://www.alertnet.org/>. *Peace Elusive as security worsens* diakses tanggal 24 April 2008

Gambar 4, Peta wilayah Sudan Barat (Darfur)⁴⁷



D. Reaksi Dunia Internasional

Masalah Darfur telah menjadi perhatian dunia akibat besarnya jumlah korban yang diakibatkan oleh perang sipil ini. Berbagai tuduhan pun seperti terjadinya pelanggaran HAM, *Etnic Cleansing*, dan Genosida menjadikan Darfur sebagai agenda penting untuk diselesaikan bersama. Berbagai tekanan baik dari PBB, Uni Afrika, Liga Arab, dan organisasi lainnya telah dilakukan untuk mencegah meluasnya konflik. Amerika Serikat pun ikut campur tangan dengan

⁴⁷ <http://www.alertnet.org/>. Peace Alusive as Security Worsens, diakses 24 April 2008

menekan Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan sanksi terhadap pemerintah Sudan.

1. Reaksi Perserikatan Bangsa-Bangsa/ *United Nation* (PBB/ UN)

Konflik di Darfur telah menjadi sorotan dunia. Konflik internal ini pun meluas dan mengakibatkan jumlah korban yang tidak sedikit. Hal ini menimbulkan semangat kemanusiaan berbagai organisasi internasional dan berupaya untuk mengatasinya. PBB sebagai supra organisasi pada intinya bertujuan menciptakan perdamaian dunia. Maka tidak asing lagi jika PBB ikut campur tangan untuk mengatasi permasalahan di Sudan tentunya dengan izin Pemerintahannya.

Sebagai bentuk tanggapan dari dunia internasional adalah dengan dikeluarkannya beberapa resolusi DK PBB, antara lain:⁴⁸

- a. Resolusi 1556, dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2004 melalui sidang DK-PBB yang memberikan tenggat waktu 30 hari kepada Pemerintah Sudan untuk melecuti senjata milisi Janjewed dan menciptakan stabilitas keamanan. Resolusi tersebut mendapat dukungan 13 negara dasar pertimbangan Bab VII Paigam PBB, yang mengkategorikan situasi di Sudan sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta kestabilan di kawasan.
- b. Resolusi 1585, disahkan pada tanggal 10 Maret 2005, dengan isi pokok sebagai berikut:

⁴⁸ Op.Cit. hlm 2-3.

- 1) menegaskan kembali kesiapan untuk membantu Sudan dalam proses perdamaian
 - 2) memutuskan untuk memperpanjang mandate UN Advance Mission (UNAMIS) yang dibentuk berdasarkan resolusi 1547 (2004) hingga tanggal 17 Maret 2005. Untuk melakukan peninjauan situasi dilapangan.
- c. Resolusi 1590, disahkan pada tanggal 30 Maret 2005 yang mengeluarkan sanksi tambahan kepada Sudan terkait masalah Darfur, dan resolusi ini akan berlaku selama 10 hari. Sanksi itu berisi:
- 1) Larangan bagi individu pelaku kejahatan perang menghalangi proses perdamaian di Darfur untuk keluar negeri;
 - 2) Embargo senjata untuk pemerintah Sudan dan larangan pesawat Pemerintah Sudan melakukan operasi militer.
- Resolusi ini disetujui oleh 12 negara dan 3 negara abstain, yaitu; Rusia, China, dan Aljazair. Mereka berpendapat sanksi ini hanya akan berdampak negatif bagi perdamaian. Disebutkan pula dalam resolusi tersebut nama pelaku kejahatan akan ditentukan oleh komite yang dibentuk oleh DK. Serta dalam pasal lain pemerintahan Sudan diharuskan melapor ke DK bila ingin mengirimkan peralatan militernya ke wilayah Darfur. Menanggapi hal ini, pemerintahan Sudan sangat marah dan menuduh resolusi ini adalah buatan AS.
- d. Resolusi 1591, dikeluarkan DK-PBB pada tanggal 29 Maret 2005 berisikan larangan bepergian dan pembekuan asset para pejabat

Pemerintah yang diduga terkait dengan pelanggaran HAM di Darfur serta larangan aktifitas militer Pemerintah dan kelompok SLM-JEM di Darfur. Resolusi ini akan diberlakukan setelah 30 hari dari tanggal dikeluarkannya resolusi ini jika Pemerintah tidak segera menyelesaikan masalah Darfur. Resolusi ini dianggap memojokkan pemerintahan Sudan dan untuk mengantisipasi pemerintahan Sudan membentuk 3 komite yaitu: Komite Hukum, Komite Politik, dan Komite Mobilisasi yang berupaya untuk mencegah diberlakukannya resolusi tersebut.

- e. Resolusi 1593, mengenai pengajuan para taersangka pelanggaran HAM ke Mahkamah Internasional. Namun Sudan menolak jika pengadilannya berada di luar negeri serta pemerintahan Sudan menolak adanya intervensi pihak asing dalam urusan dalam negeri Sudan.
- f. Resolusi 1755, mengenai perpanjangan mandat UNMIS hingga Oktober 2007
- g. Resolusi 1769, mengenai pembentukan pasukan hybrid atau gabungan antara pasukan PBB dan Pasukan UA hingga disebut UNAMID (*United Nations- Africans Mission in Darfur*)

2. Reaksi Uni Afrika

Reaksi Uni Afrika merupakan keterwakilan dari pandangan para pemimpin negara-negara di Afrika yang melihat konflik ini sebagai salah satu

isu kawasan yang memprihatinkan dan dapat merembet dan memicu konflik lainnya di Afrika. Konflik di Sudan pada dasarnya adalah konflik dalam negeri Sudan, hanya saja meluas dan mengakibatkan bencana kemanusiaan dengan isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok bersenjata maupun Pemerintah Sudan sendiri. Krisis ini tentunya mengakibatkan ketidakstabilan kawasan apalagi Chad yang berbatasan langsung dengan Sudan menjadi tempat diungsikannya sebagian besar rakyat Darfur. Peristiwa penyerangan warga tidak hanya terjadi di Darfur namun terjadi juga di wilayah perbatasan sebagai negara yang bersinggungan langsung dengan wilayah Konflik. Pemerintahan Chad menyalahkan pemerintahan Sudan yang mensupport militias Janjaweed. Militansi Janjaweed telah menyerang warga di Chad dan juga menyerang para pengungsi Darfur yang berada di Chad. Chad juga menuduh Pemerintahan Sudan telah mendukung gerakan kelompok pemberontak bersenjata kecil di Chad yakni *the Union of Forces for Democracy and Development* (UFDD), dan para pembelot bersenjata yang telah melakukan penyerangan dari wilayah Darfur. Hal ini telah menyebabkan ketegangan komunal di wilayah Timur Chad yang hampir memiliki kesamaan etnis dengan wilayah Darfur.⁴⁹

Sementara itu pemerintahan Sudan menuduh Pemerintahan Chad yang di pimpin oleh Idris Deby mendukung salah satu kelompok pemberontakan Darfur. Hal ini dikarenakan Idris Deby berasal dari etnis Zaghawa yakni etnis non Arab di Darfur. Namun Idris Deby menolak tuduhan tersebut. Kemudian Republik Afrika Tengah yang berbatsan dengan Darfur menuduh Sudan telah mendukung

⁴⁹ www.bbc.com. Darfur conflict zones, diakses 17 Agustus 2008

kelompok pemberontak Union of Democratic Forces for Unity (UFDR) dinegara tersebut. Chad mengatakan akan mengirim pasukannya untuk menolong Republik Afrika Tengah untuk melawan pemberontak di sana. Mereka menyalahkan Pemerintah Sudan yang mengekspor konflik kewilayah Negara tersebut. Pengungsi masih terus berdatangan dan masih akan menyebabkan masalah baru jika hal ini tidak segera di atasi.

Proses mediasi yang telah dilakukan pihak internasional telah sangat gencar, Uni Afrika pun berupaya untuk membantu terselesainya konflik ini. Hal ini dirasakan penting karena pihak pemerintah Sudan sendiri awalnya menolak kehadiran pasukan perdamaian PBB ataupun AS yang ingin melakukan misinya di Sudan. Pada akhirnya Uni Afrika mampu mempertemukan kelompok-kelompok bertikai di Sudan pada tanggal 8 April 2004 dengan bantuan Presiden Chad, **Idriss Deby** dan Ketua Uni Afrika. Pertemuan tersebut dihadiri oleh fasilitator. Dan akhirnya ditandatangani *Humanitarian Ceasefire Agreement* (HCFA) untuk konflik Darfur. HCFA yang berisikan pokok-pokok gencatan senjata serta menjadi mandat awal terbentuknya pasukan perdamaian Uni Afrika di Sudan atau *Uni African Mission in Sudan* (AMIS) yang mulai memantau pelaksanaan *Ceasefire Agreement* bulan Mei 2004 dan *Darfur Peace Agreement* (DPA) 2006. Untuk selengkapnya akan dibahas dalam bab IV, dalam laporan ini. Pembentukan pasukan ini sendiri pun telah melibatkan berbagai negara di Darfur, terutama untuk pemenuhan kuota personil pasukan militer. Diawal misi AMIS, negara-negara yang telah berkontribusi mengirimkan pasukan adalah Nigeria,

Rwanda, Senegal, Afrika Selatan, Kenya, dan semakin bertambah sesuai kebutuhan pertahunnya. Jadi tampak jelas bahwa negara di Afrika mendukung perundingan damai dan semua kegiatan dalam kerangka Un Afrika.

3. Reaksi Amerika Serikat

AS merupakan negara adikuasa di dunia dan agresif dalam menekankan nilai-nilai politik luar negerinya kepada negara lain di dunia. Jika dahulu terdapat kekuatan penyeimbang di dunia seperti Uni Soviet, maka AS sangat gencar menyebarkan pengaruhnya baik di Asia, Afrika maupun Eropa. Untuk di wilayah Afrika, Pemerintahan AS berkomitmen untuk mendukung upaya perdamaian dan keamanan Afrika. AS juga menginginkan tetap dijaganya suplay minyak dunia dan gas yang sangat bergantung pada negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Membantu menghadapi ancaman-ancaman yang membahayakan keamanan dari negara-negara sahabat AS yang berada di kawasan Afrika. Serta membangun koordinasi yang lebih efektif dalam merespon terorisme di Afrika karena AS menganggap bahwa Afrika merupakan tempat atau sarang terorisme.

Berdasarkan dasar kepentingan tersebut, AS seringkali terlibat dalam urusan politik negara lain. Bahkan terkadang untuk mewujudkan kepentingannya AS tidak segan-segan melakukan ancaman langsung maupun intervensi tidak langsung lewat PBB. Misalnya saja kasus di negara Sudan. Sudan memang memiliki potensi konflik yang sangat besar hal ini dibuktikan dengan adanya perang saudara di Sudan Selatan, Sudan Timur, dan Sudan Barat. Negara Sudan

yang hampir mayoritas beragama Islam dilihat sebagai salah satu kekhawatiran AS dalam meningkatkan pengaruhnya di wilayah Afrika.

Mencuatnya berbagai konflik di Sudan selain masalah internal dinilai sebagian tokoh Arab sebagai politik memecah belah Sudan.⁵⁰ Konflik Darfur yang terjadi di tahun 2003 dianggap sebagai konflik yang terkait oleh banyak hal seperti politik, dan motif ekonomi dikarenakan ditemukannya sumber daya mineral dan minyak yang besar di wilayah Darfur dan Sudan Selatan. Akan tetapi sebagian besar saham perusahaan minyak disana dimiliki oleh China. Sebelum mencuatnya konflik Darfur menyangkut Sudan, AS telah lama menginginkan perubahan dalam sistem pemerintahannya menjadi lebih demokratis dan diharapkan pemerintah Sudan dapat meningkatkan perekonomian rakyatnya. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan politik AS untuk menyebarkan isu demokratisasi untuk meminimalisir sikap kontra terhadap kebijakan AS.

Namun di sisi lain AS juga menekankan sanksi kepada pemerintahan Sudan terkait masalah terorisme. Isu terorisme memang menjadi hangat setelah AS menyebarkan isu menentang aksi terorisme terkait pemboman WTC. Wilayah Timur Tengah memang identik dengan aksi terorisme dan Sudan termasuk didalam daftar negara Timur Tengah yang dianggap AS ikut mendukung aksi ini. Selain Sudan yang termasuk lainnya adalah negara Libya, Suriah, Korea Utara dan Iran. Sebelumnya **Osama Bin Laden** pernah mendiami Sudan dan disinyalir **Osama** memiliki kedekatan dengan pemerintahan Sudan.

⁵⁰ <http://oaseislam.com/>, "Dunia Arab curiga AS akan menggulingkan Pemerintahan Sudan", diakses 20 April 2008.

Terkait masalah Darfur, Pemerintahan AS sendiri sebenarnya telah lebih dulu beraksi ikut menengahi konflik di Sudan Selatan. Di Darfur, AS kembali menekan Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi di Sudan dikarenakan peningkatan konflik yang ditakutkan mengancam keamanan wilayah Afrika. Selain itu, Kongres Amerika Serikat menilai pembunuhan dan pemerkosaan, dan penjarahan di Darfur sudah masuk dalam ambang batas genosida. Pemerintahan Khartoum tentu bereaksi keras menentang tuduhan tersebut. Namun banyak fakta yang menyebutkan Pejabat Khartoum memiliki hubungan dan mendukung aksi militansi Janjaweed yang melakukan penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan di Darfur sebagai bagian dari aksi Pemerintah Sudan menekan kelompok pemberontak Darfur. AS telah menekan pihak Sudan lewat PBB supaya mengeluarkan sejumlah resolusi untuk menekan pihak Sudan.

Menurut **Syaikh Ibrahim Utsman Abu Khalil**, Juru Bicara Hizbut Tahrir Sudan, realitas di Darfur hakikatnya adalah pertarungan pengaruh antara Eropa dan Amerika di kawasan itu. AS berusaha untuk memupus pengaruh Eropa di wilayah Sudan dan berkeinginan untuk dapat menjalankan ekspansi kapitalisme akan sumber daya alam, minyak, mineral yang terdapat di Sudan. Prancis, Inggris dan Jerman tidak menginginkan hal tersebut terjadi. sehingga ketiganya mendukung pemberontak dengan men-*suplay* harta, senjata dan sebagainya. Amerika ingin memaksakan pakta antara Darfur (Sudan Utara) dan Sudan Selatan. Eropa tidak menyetujuinya, karena dengan begitu Sudan akan sepenuhnya berada di bawah pengaruh Amerika. Inggris pun merasa risau. Inggris

menganggap Sudan merupakan kawasan yang dulunya berada di bawah pengaruh Inggris, karena Sudan dulu adalah jajahan Inggris. Di pihak lain, Prancis mengkhawatirkan pengaruh Amerika akan menyebar di seluruh Afrika. Prancis memiliki pengaruh di wilayah barat Afrika, khususnya di Chad yang berbatasan dengan Darfur. Lalu masalah Darfur pun dikobarkan dengan jalan itu. Eropa ingin agar Amerika tidak tenang dengan apa yang dilakukannya terhadap Sudan Selatan. Eropa menjadikan problem Darfur sebagai masalah supaya jangan sampai Amerika menancapkan pengaruhnya di seluruh Sudan. Inilah yang terjadi di Darfur, yaitu pertarungan Amerika dengan Eropa.⁵¹

⁵¹ <http://www.hizbut-tahrir.or.id/al-waie/index.php/2007/10/01/krisis-afrika-pertarungan-as-dan-eropa>, diakses 20 April 2008.